

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kerajinan, ini merupakan simbol kekayaan seni, budaya yang dihasilkan melalui ide kreatif. Keanekaragaman kebudayaannya yang ada di Indonesia dapat dikatakan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lain. Indonesia mempunyai kebudayaan yang lengkap dan bervariasi. Hasil karya masyarakat tradisional pada dasarnya termasuk dalam obyek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

HKI tradisional masyarakat tidak hanya mempunyai arti penting bagi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi negara dan masyarakat internasional baik untuk mempertahankan lingkungan hidup yang berkelanjutan, pengembangan sains dan teknologi maupun untuk perolehan keuntungan ekonomis. Mengacu pada alasan moral, hukum, dan kemanfaatan, sebenarnya sudah cukup menjadi alasan dan dasar yang kuat bagi suatu negara dan masyarakat internasional untuk mengatur perlindungan hukum terhadap HKI tradisional.

HKI tradisional melingkupi Pengetahuan tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang dimana sangat terkait dengan kreativitas manusia, daya cipta manusia dalam memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah

kehidupannya, baik dalam seni, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun produk unggulan suatu masyarakat, oleh karena itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan eksistensi HKI sangat penting.

HKI pada dasarnya merupakan hak yang diberikan kepada subjek yang karena kreativitasnya memunculkan suatu karya kreatif yang memiliki manfaat atau nilai ekonomis bagi kehidupan manusia. HKI memberikan dasar bagi subjek kreatif tersebut untuk mengambil manfaat ekonomis dari karya dan memberikan dasar larangan bagi orang yang tidak berhak untuk mengambil keuntungan secara tidak sah. HKI juga memberikan pengakuan atas kreativitas manusia berupa hak moral yang berupa larangan untuk meniadakan identitas subjek yang berkarya atau mengubah karya orang lain tanpa seijin dari yang berkarya.

Permasalahan HKI akan menyentuh berbagai aspek diantaranya aspek teknologi, industri, sosial, hukum, budaya, dan berbagai aspek lainnya, akan tetapi aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan HKI tersebut, hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan HKI. Secara umum kekayaan intelektual dapat dikelompokkan kedalam dua bagian, yakni hak komunal dan hak personal. Berikut ini adalah karakteristik yang dimiliki oleh kedua hak tersebut.

1. Prinsip Hak Komunal

- a. Diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya;
- b. Memperlihatkan identitas dan budaya masyarakat tertentu;
- c. Bagian dari warisan budaya;
- d. Tidak dikenal pembuatnya/penciptanya;
- e. Umumnya bukan untuk tujuan komersil tetapi lebih diutamakan sebagai sarana budaya dan agama;
- f. Berkembang dan muncul dikalangan masyarakat;
- g. Kepemilikan dan pelestarian bersifat komunal (bersama) ;
- h. Perlindungan/pelestarian dikehendaki tidak terbatas waktunya;
- i. Perlindungan hukumnya harus berdasarkan pengakuan setiap pihak dan bersifat deklaratif (otomatis/tanpa pendaftaran); dan hak kebendaan (*tangible dan intangible*/material dan moral) dimiliki oleh negara.

2. Prinsip Hak Personal

- a. Diteruskan dari penelitian ilmiah/praktik bisnis/karya seniman dan dilakukan oleh individu/badan hukum;
- b. Memerhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, teknologi, atau sastra dari individu/badan hukum tertentu;
- c. Bagian dari perkembangan iptek/seni/perdagangan/bisnis;
- d. Dikenali inventornya/peciptanya/pelaku bisnisnya;
- e. Untuk tujuan komersil dan kepemilikannya bersifat monopoli.

Di Indonesia salah satu isu yang menarik dan saat ini tengah berkembang adalah perlindungan hukum terhadap HKI tradisional yang merupakan ruang lingkup didalam HKI yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional.¹ Tuntutan untuk adanya perlindungan bagi HKI tradisional merupakan isu baru dalam kaitannya dengan perlindungan HKI yang dimana tidak ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang HKI tradisional. Di dalam Undang-undang Hak Cipta hanya dijelaskan pengertian Folklor atau Ekspresi Budaya Tradisional yang merupakan bagian dari HKI tradisional itu sendiri.

Menurut Ir. Arif Syamsudin HKI tradisional mencakup juga pengetahuan tradisional yang mempunyai bentuk folklor atau ekspresi budaya tradisional (EBT) yang dimana didalamnya mencakup musik tradisional, narasi dan literatur

¹Sudarmanto, 2012, *KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm 3.

tradisional, seni tradisional, kerajinan tradisional, simbol/nama/istilah tradisional, pertunjukan tradisional, seni arsitektur tradisional, dan lain-lain. Contoh folklor atau EBT dikelompokkan menjadi ekspresi verbal : berpantun, berpuisi, kata/tanda/symbol ; ekspresi musik ; instrumen musik, pelantun lagu ; ekspresi gerakan ; tari-tarian, bentuk permainan, upacara ritual, sesaji, ekspresi bentuk nyata : produksi seni tradisional misalnya saja seperti menggambar, memahat patung, kerajinan kayu, perhiasan, karpet tradisional, alat-alat musik tradisional, bangunan dan arsitektur tradisional.²

Berdasarkan undang-undang Hak Cipta, folklor adalah sekumpulan ciptaan tradisional. Suatu ciptaan dikualifikasikan sebagai tradisional apabila ciptaan tersebut dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, dan ciptaan tersebut menunjukkan identitas sosial dan budaya penciptanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun.

Kekayaan intelektual tradisional erat kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat adat, masyarakat adat sangat kental dengan kemampuan dan keterampilan mereka untuk mengelola kekayaan intelektual tradisional tersebut secara lestari dan berkelanjutan, pengelolaan dan pelestarian kekayaan intelektual tradisional masyarakat adat ditentukan oleh tradisi, hukum dan praktek-praktek

² Ibid, hlm 5.

yang ada dalam komunitas adat yang bersangkutan, oleh sekelompok orang, klan atau masyarakat adat itu sendiri secara utuh.³

HKI tradisional merupakan masalah hukum baru yang berkembang baik di tingkat nasional maupun internasional. HKI tradisional telah muncul menjadi masalah hukum baru disebabkan belum ada instrumen hukum domestik yang mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap HKI tradisional yang sangat banyak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pengaturan HKI dalam lingkup internasional sebagaimana terdapat dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), misalnya hingga saat ini belum mengakomodasi semua kekayaan intelektual tradisional yang dihasilkan oleh masyarakat asli. Adanya fenomena tersebut maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual tradisional hingga saat ini masih lemah. Sayangnya hal ini justru terjadi di saat masyarakat dunia tengah bergerak menuju suatu trend yang dikenal dengan gerakan kembali ke alam (*back to nature*).

Kecenderungan masyarakat dunia ini menyebabkan eksplorasi dan eksploitasi terhadap HKI tradisional semakin meningkat karena masyarakat asli selama ini memang dikenal mempunyai kearifan tersendiri sehingga mereka memiliki sejumlah kekayaan intelektual tradisional yang sangat bersahabat dengan alam. Akibat lemahnya perlindungan hukum terhadap pengetahuan

³ Bushar Muhammad, 1994, *Asas-asas Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 30.

tradisional ini maka yang kebanyakan terjadi justru adalah eksploitasi yang tidak sah oleh pihak asing.

Konsep pengetahuan HKI barat sangat bertolak belakang dengan sistem hukum adat di Indonesia, umumnya masyarakat adat di Indonesia mempunyai satu kesamaan, yaitu sifat komunal atau sifat mementingkan keseluruhan.⁴ Kepentingan individu dalam hukum adat selalu diimbangi oleh hak-hak umum, konsep harta komunal didalam masyarakat adat, mengakibatkan HKI gaya barat tidak dimengerti sebagian besar masyarakat adat, sifat HKI yang individualistik akan disalah artikan atau diabaikan karena tidak relevan dengan sistem masyarakat adat yang kolektif.

Idealnya perlindungan HKI di Indonesia seharusnya berlandaskan pada struktur masyarakat yang ada di Indonesia. Dalam mengetahui hukum pada suatu masyarakat, perlu diketahui terlebih dahulu sifat dan lembaga-lembaga hukum dimana masyarakatnya sehari-hari dikuasai oleh hukum tersebut. Hal ini dikarenakan struktur masyarakat menentukan sistem hukum yang berlaku di masyarakat tersebut.⁵

Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, memandang bahwa HKI hanya akan dinikmati oleh negara maju sebagai pengeksport kekayaan intelektual. Negara maju dengan kelebihan teknologinya akan mampu menghasilkan kekayaan intelektual yang bernilai tinggi di pasar global. Pada

⁴Ibid. hlm 46.

⁵ R. Soepomo, 1997, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 41.

negara-negara berkembang justru sebaliknya, produksinya sebagian besar dari kekayaan intelektual tradisional.

Menurut Rahardi Ramelan pemberian hak monopoli ini, sering kali merugikan kepentingan umum dan tidak selalu sama dengan wilayah lain.⁶ Indonesia misalnya, HKI tradisional yang berkembang berorientasi kepada komunitas, bukan individu. Sehingga masalah perlindungan pengetahuan tradisional yang muncul selalu harus diselesaikan secara khusus. Praktek monopoli terlebih dalam HKI menjadi suatu yang asing dalam masyarakat Indonesia yang memiliki kepemilikan bersama, orang-orang dengan hubungan kekerabatan dekat, seperti keluarga bathin, mungkin untuk secara bersama mengatasnamakan hak kepemilikan atas suatu benda, dimana hak kepemilikan ini tidak selalu disahkan menurut hukum, melainkan atas dasar konvensi, masing-masing anggota boleh memanfaatkan guna benda untuk keperluan pribadi atau bersama, dengan sepengetahuan yang lain. Hal ini dimungkinkan selain akibat anggotanya percaya dan menghormati kebersamaan yang termaknakan pada benda, juga karena di sini kedekatan hubungan pada umumnya merupakan jaminan.⁷

HKI bersifat asing bagi kalangan masyarakat yang mendasari hukum adat, sehingga kemungkinan besar tidak akan berpengaruh atau walaupun ada pengaruhnya kecil di kebanyakan wilayah di Indonesia. Hal inilah yang

⁶ http://eprints.undip.ac.id/16220/1/AGNES_VIRA_ARDIAN.pdf, Agnes Vira Ardian, PROSPEK PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM KESENIAN TRADISIONAL DI INDONESIA, hlm 23, diakses pada tanggal 2 Januari 201.

⁷ Ibid.

barangkali menjadi halangan terbesar yang dapat membantu melegitimasi penolakan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia yaitu konsep yang sudah lama diakui kebanyakan masyarakat Indonesia sesuai dengan hukum adat.⁸

Prinsip hukum adat yang universal dan mungkin yang paling fundamental adalah bahwa hukum adat lebih mementingkan masyarakat dibandingkan individu, dikatakan bahwa pemegang hak harus dapat membenarkan penggunaan hak itu sesuai dengan fungsi hak di dalam suatu masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter Jaszi dari *American University* bahwa perlindungan hukum sebaiknya disesuaikan dengan roh dan semangat dari budaya tradisional tersebut.⁹

Peraturan yang dibuat tidak digeneralisasi yang akhirnya membuat kekayaan intelektual yang berlandaskan tradisional sebagai subyek dari bentuk baru perlindungan kekayaan intelektual. HKI tradisional Indonesia dalam dilema. Di satu sisi rentan terhadap klaim oleh negara lain, di sisi lain pendaftaran kekayaan intelektual tradisional sama saja menghilangkan nilai budaya dan kesejarahan yang melahirkannya dan menggantinya dengan individualisme dan liberalisme.

Indonesia telah menghasilkan karya-karya artistik yang luar biasa, karya-karya ini merupakan aspek dari hubungan lokal dan hubungan yang lebih luas dalam bidang perdagangan, agama, kekerabatan dan juga politik. HKI tradisional ini memiliki nilai bagi masyarakat Indonesia, HKI tradisional bukan hanya

⁸ Ibid, hlm 24 diakses pada tanggal 2 Januari 2014.

⁹ Ibid.

merupakan suatu hiburan, wahana inspirasi dan pencerahan bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menempatkan dirinya secara positif dan kreatif dalam hubungannya terhadap sesama dan dalam hubungannya terhadap agama.

Pengetahuan dan praktek kesenian berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi, identitas kelompok, kebanggaan terhadap daerah dan bangsanya, serta pengembangan kesadaran etika yang mendalam dan bersifat khas, gairah kehidupan kesenian ini sebagai sumber dan juga hasil dari proses hubungan yang bersifat kompleks. Gairah berkeaktifitas ini muncul dari sebuah keragaman asli. Pengetahuan tradisional Indonesia seperti wayang kulit, batik Jawa, tarian, tenun ikat Bali, kain songket, dan alat musik Sasando yang dalam sepanjang sejarah telah dipraktekkan sebagaimana layaknya HKI tradisional lainnya.

Sebagai salah satu negara yang terdiri atas berbagai macam suku dan sangat kaya akan keragaman tradisi dan budaya, Indonesia tentunya memiliki kepentingan tersendiri dalam perlindungan hukum terhadap HKI tradisional, ditambah lagi posisi Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya yang besar untuk pengembangan di bidang kesenian, karena perlindungan hukum terhadap HKI tradisional masih lemah, maka potensi yang dimiliki oleh Indonesia tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak asing secara tidak sah. Indonesia memiliki banyak komoditas asli. Akan tetapi, semuanya tak berarti apa-apa jika komoditas itu dicuri dan dimanfaatkan pihak asing.

Salah satu contoh HKI tradisional yang dimiliki Indonesia adalah alat musik tradisional Sasando, Sasando dibuat oleh masyarakat adat Pulau Rote yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pembuatan alat musik Sasando ini dilakukan secara tradisional, diturunkan dari generasi ke generasi dan diteruskan dikembangkan serta dilestarikan dengan cara-cara yang tradisional.

Secara harfiah nama Sasando menurut asal katanya dalam bahasa Rote, sasandu, yang artinya alat yang bergetar atau berbunyi. Konon sasando digunakan di kalangan masyarakat Rote sejak abad ke-7, bentuk sasando ada miripnya dengan instrumen petik lainnya seperti gitar, biola dan kecapi, bagian utama sasando berbentuk tabung panjang yang biasa terbuat dari bambu, lalu pada bagian tengah, melingkar dari atas ke bawah diberi ganjalan-ganjalan di mana senar-senar (dawai-dawai) yang direntangkan di tabung, dari atas kebawah bertumpu, ganjalan-ganjalan ini memberikan nada yang berbeda-beda kepada setiap petikan senar, lalu tabung sasando ini ditaruh dalam sebuah wadah yang terbuat dari semacam anyaman daun lontar yang dibuat seperti kipas. Wadah ini merupakan tempat resonansi sasando.¹⁰

Di NTT sendiri pelestarian atas alat musik Sasando telah dilaksanakan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari upaya konkret yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama masyarakat di wilayah NTT adalah dengan menggelar sejumlah kegiatan promosi baik di tingkat lokal dan nasional, demi menggairahkan semangat para pemilik dan pemain sasando untuk lebih giat dan terus mendalami petikan alat tersebut untuk dijual sebagai bagian dari promosi kebudayaan dan

¹⁰<http://id.wikipedia.org/wiki/Sasando> , diakses pada tanggal 9 Juni 2013.

pariwisata di NTT, selain melakukan kegiatan promosi dengan sejumlah kegiatan di antaranya festival Sasando, seni musik petik Sasando juga dimasukkan dalam salah satu bagian dari mata pelajaran di sekolah-sekolah sebagai bagian dari muatan lokal pelajaran para siswa.¹¹

Jika melihat dari pengalaman selama ini pelestarian saja belum cukup, seharusnya ada perlindungan hukum secara khusus dari Pemerintah Daerah NTT yang dimana sampai saat ini belum ada peraturan atau kebijaksanaan yang mengatur secara khusus tentang alat musik tradisional Sasando.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dengan persoalan yang terjadi maka, hal tersebut sangat mendorong untuk melakukan penulisan hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Nusa Tenggara Timur Dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Tradisional Atas Alat Musik Tradisional Sasando“

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan yaitu :

1. Apakah sudah ada perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual tradisional khususnya atas alat musik tradisional Sasando ?
2. Bagaimana langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah NTT dalam melindungi HKI tradisional atas alat musik tradisional Sasando ?

¹¹<http://antaranntt.com/print/28/kementerian-pariwisata-ri-inisiasi-konser-musik-sasando>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2013.

3. Bagaimana peranan yang dilakukan Pemerintah Daerah NTT kepada masyarakat adat pulau Rote yang selama ini mengembangkan serta melestarikan alat musik tradisional Sasando ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk :

1. Untuk memperoleh data dan mengkaji tentang perlindungan hukum yang dilakukan Pemerintah Daerah NTT dalam melindungi Alat Musik Tradisional Sasando serta melihat seberapa jauh peranan Pemerintah Daerah NTT kepada masyarakat adat pulau Rote yang selama ini mengembangkan serta melestarikan alat musik tradisional Sasando.
2. Untuk memahami perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah Nusa Tenggara Timur dalam melindungi Alat Musik Tradisional Sasando dan mengerti seberapa jauh peranan Pemerintah Daerah NTT kepada masyarakat adat pulau Rote yang selama ini mengembangkan serta melestarikan alat musik tradisional Sasando.
3. Sebagai pemenuhan penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai ilmu pengetahuan mengenai HKI.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan manfaat/masukan berupa literatur dalam bidang ilmu hukum khususnya Hak Kekayaan Intelektual.
- b. Dapat memberikan sumbangan pedoman dan masukan bagi Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur agar lebih memperhatikan setiap hasil kekayaan intelektual tradisional daerah setempat.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan cara pandang tentang perlunya perlindungan hukum terhadap HKI tradisional bagi peneliti sendiri, hasil penelitian hukum ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan penulis agar dapat belajar dan mengetahui tentang perlindungan terhadap HKI tradisional.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penelitian hukum judul **”Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Nusa Tenggara Timur Dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Tradisional Atas Alat Musik Tradisional Sasando“** merupakan karya asli dan bukan merupakan hasil jiplakan atau plagiasi maupun duplikasi dari hasil karya penulis lain. Permasalahan hukum

yang diteliti sepanjang pengetahuan penulis belum pernah diteliti oleh peneliti lain.

F. BATASAN KONSEP

1. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹²

2. Pemerintah

Menurut Undang – Undang Dasar 1945 Pemerintah mempunyai dua pengertian.

- a. Dalam arti luas : Pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam mencapai tujuan negara.
- b. Dalam arti sempit : Pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam mencapai tujuan negara.

Dan menurut Utrecht ada tiga pengertian :

¹² <http://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum/> diakses pada tanggal 13 Maret 2014.

- a) Pemerintahan adalah gabungan dari semua badan kenegaraan yang memiliki kekuasaan untuk memerintah (*Legislatif, Eksekutif, Yudikatif*).
- b) Pemerintahan adalah gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi yang memiliki kekuasaan memerintah (Presiden, Raja, Yang dipertuan Agung).
- c) Pemerintahan dalam arti kepala negara (Presiden) bersama kabinetnya.

3. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

4. Alat Musik Tradisional

Alat musik tradisional adalah alat musik yang berasal dari berbagai daerah, dalam hal ini di Indonesia yang dimana alat musik tradisional ini lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu dan diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.

5. Sasando

Adalah sebuah alat instrumen petik musik. Instrumen musik ini berasal dari pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Secara harfiah nama Sasando menurut asal katanya dalam bahasa Rote, *sasandu*, yang artinya alat yang bergetar atau berbunyi.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) atau penelitian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif digunakan oleh penulis karena penulis mengambil judul “Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Tradisional Atas Alat Musik Tradisional Sasando“. Penelitian ini melakukan abstraksi yaitu dengan melakukan suatu perbuatan memisah-misahkan, membandingkan, mencari persamaan dan mencari perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain.

2. Sumber Data

A. Data primer

Data primer terdiri dari hasil wawancara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi NTT, Kepala Badan Biro Hukum Setda Propinsi NTT dan Bapak Jeremias A. Pah selaku pengembang, pengrajin dan pelestari alat musik tradisional Sasando.

B. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari :

- a) Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 10 ayat (2) dengan istilah *Folklor*, Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dan Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah (UU Pemda).
- b) Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

3. Cara Pengumpulan Data

- a) Studi lapangan
 - 1. Cara pengumpulan data dalam penelitian hukum ini adalah dengan cara kuesioner yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya tentang objek hak kekayaan intelektual tradisional alat musik sasando yang di teliti (baik bersifat terbuka atau tertutup).
 - 2. Disamping pengumpulan data dengan cara kuesioner juga dengan cara wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada nara sumber yaitu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nusa Tenggara Timur, Kepala Biro Hukum Propinsi Nusa Tenggara Timur dan pemain, pelestari serta pengrajin alat musik tradisional Sasando tentang pengetahuan tradisional alat musik sasando yang merupakan objek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun.

b) Studi pustaka

Dalam penelitian hukum ini studi pustaka dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Metode Analisis Data

Penelitian hukum normatif digunakan analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Penelitian hukum ini menganalisis data primer yang berupa hasil wawancara dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Biro Hukum Setda Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Bapak Jeremias A. Pah sebagai pengrajin, pelestari serta pengembang alat musik tradisional Sasando dan data sekunder yang berupa Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 10 ayat (2) dengan istilah *Folklor*, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dan Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah (UU Pemda). Hasil analisis ini kemudian dituangkan didalam bab II untuk menjawab permasalahan hukum yang ada.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sebagai sarana memperoleh data adalah di Dinas Pariwisata Propinsi NTT, Biro Hukum Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Pengrajin alat musik tradisional Sasando.

6. Narasumber

Narasumber sebagai sarana memperoleh data adalah Kepala Dinas Pariwisata NTT, Kepala Biro Hukum Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Bapak Yeremias A. Pah sebagai pengembang, pelestari dan pengrajin alat musik tradisional Sasando.

H. SISTEMATIKA PENELITIAN HUKUM

Penelitian hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan bab yang satu dengan bab yang lainnya. Penyusunan bab per bab ini dimaksudkan agar dalam penelitian hukum ini dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis, adapun bab-bab tersebut adalah :

Bab pertama menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini, sistematika penulisan hukum dalam penulisan ini dan daftar pustaka.

Bab kedua menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai perlindungan hukum yang dilakukan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur dalam melindungi HKI tradisional Atas Alat Musik Tradisional Sasando serta melihat seberapa jauh peranan Pemerintah Daerah NTT kepada masyarakat adat pulau Rote yang selama ini mengembangkan serta melestarikan alat musik tradisional Sasando.

Bab ketiga merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti, yang disertai saran-saran yang

dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kesadaran akan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual tradisional dalam prakteknya di Indonesia di masa mendatang.